

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah Joko Widodo<sup>1</sup> terpilih sebagai presiden Indonesia yang ketujuh di tahun 2014, kebijakan Indonesia bisa dikatakan berubah terutama dalam masalah kemaritiman. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Jokowi yang menjadikan isu maritim sebagai isu utama dalam pemerintahannya. Berbeda dengan kepemimpinan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 10 tahun tetapi tidak menjadikan isu maritim sebagai isu atau visi utama pemerintahannya. Dibawah kepemimpinan Jokowi sangat terlihat jelas apa yang menjadi prioritas pemerintah selama satu periode kedepan terutama dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia. Jokowi menggunakan Konsep *Tri Sakti*<sup>2</sup> Soekarno sebagai landasan dari pemerintahannya untuk lima tahun kedepan.

Salah satu hal yang paling menonjol adalah terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia di sektor kemaritiman. Keseriusan ini bisa dilihat ketika Jokowi resmi diumumkan oleh KPU sebagai presiden Indonesia ke tujuh dengan melakukan pidato kemenangan di atas kapal Pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa. Alasan pemilihan tempat di pelabuhan Sunda Kelapa karena pelabuhan ini

---

<sup>1</sup>Selanjutnya disingkat Jokowi

<sup>2</sup> Tri Sakti merupakan konsep dasar yang dibuat oleh Soekarno di masa pemerintahannya yang berfungsi untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat. Konsep Tri Sakti yakni mempunyai tiga poin yang mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur untuk kemajuan Indonesia. Poin yang pertama adalah berdaulat dalam bidang politik. Kedua adalah berdikari di bidang ekonomi dan yang terakhir adalah berkepribadian dalam bidang budaya. [http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf) (26-04-2017, 10.45 WIB)

merupakan pelabuhan yang mempunyai sejarah yang panjang di pulau Jawa sedangkan pemilihan kapal Pinisi merupakan sebuah simbol keseriusan pemerintah Jokowi dalam mengembalikan kekuatan Indonesia sebagai negara maritim.<sup>3</sup> Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa dan kapal Pinisi merupakan dua simbol Indonesia sebagai negara maritim yang kembali diangkat oleh Jokowi untuk menggambarkan keseriusan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan laut Indonesia.

Kebijakan luar negeri ini juga terlihat jelas ketika Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada pelantikan presiden Indonesia yang ke tujuh. Dibawah ini merupakan pidato Jokowi ketika dilantik menjadi presiden Indonesia ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014 di gedung MPR RI:

*“ ... Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungselat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembalimembahana ... ”<sup>4</sup>*

Melihat pidato diatas, sudah sangat jelas bahwa salah satu arah kebijakan luar negeri Indonesia adalah terkait dengan kemaritiman. Isu kemaritimaan ini

---

<sup>3</sup> Halimatus Sa'diyah, *Ini Cerita di Balik Lokasi Pidato Kemenangan Jokowi*, Diakses dalam <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/23/n95zna-ini-cerita-di-balik-lokasi-pidato-kemenangan-jokowi> , (28-03-2018, 07:44 WIB)

<sup>4</sup> Faizal Fanani, *Isi Lengkap Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Jokowi*, diakses dalam <http://news.liputan6.com/read/2293713/isi-lengkap-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi> (19-12-2016, 11:40 WIB)

menjadi salah satu *nawa cita*<sup>5</sup> Jokowi dalam kepemimpinannya lima tahun kedepan. Dengan adanya konsep nawacita ini bisa dilihat arah kebijakan luar negeri Indonesia kedepan terutama dalam sektor kemaritiman. Pembahasan tentang maritim sebenarnya sudah pernah ada di masa pemerintahan Soekarno. Dimana pada waktu itu Soekarno juga pernah menyampaikan pidato yang serupa terkait dengan maritim. Pidato Soekarno sebagai berikut:

*“ ... Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya..., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan! tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”(Amanat Presiden RI Sukarno padaperesmian Institut Angkatan Laut, 1953).<sup>6</sup>*

Semenjak pergantian pemimpin setelah Soekarno arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal kemaritiman mulai terabaikan dan tidak mendapat perhatian lebih. Namun dibawah kepemimpinan Jokowi isu kemaritiman kembali diangkat menjadi salah satu tujuan dari kepemimpinannya lima tahun kedepan. Hal ini tidak bisa terlepas dari peran kelompok atau individu yang banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan

---

<sup>5</sup>Nawa Cita merupakan sebutan atau istilah agenda yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam mencapai tujuan dan visi misi pemerintahannya dalam lima tahun kedepan. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan atau untuk mencapai Tri Darma yang pernah dibuat oleh pemerintahan Soekarno. <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> (26-04-2017, 10:54 WIB)

<sup>6</sup>Bakosurtanal, *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri*, diakses dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-yang-maju-dan-mandiri> ( 19-12-2016, 11:50 WIB)

yang dikeluarkan oleh Jokowi. Dari pidato diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi hampir sama apa yang disampaikan Soekarno dimasa kepemimpinannya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh laut sehingga Indonesia banyak dikenal sebagai negara maritim. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti, sebagai negara maritim, Indonesia tentunya harus bisa menjaga laut yang merupakan masa depan bangsa sehingga harus memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan nasional untuk kedepan.<sup>7</sup> Jokowi dalam pidato KTT ASEAN 12 November di Myanmar menyampaikan lima pilar dasar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Lima pilar tersebut adalah *Pertama* akan membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai bangsa yang identitasnya, kesejahteraannya dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah bisa mengelola samudera dengan baik. *Kedua*, akan menjaga dan mengelola sumber daya laut yang lebih fokus membangun kedaulatan pangan laut dengan pengembangan industri perikanan serta menempatkan nelayan sebagai pilar utama. *Ketiga*, akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. *Keempat*, melalui diplomasi maritim yang mengajak mitra-mitra Indonesia dalam kerjasama di bidang kelautan ini. *Kelima*, sebagai negara yang menjadi titik

---

<sup>7</sup> Agung Susatyo, *Mewujudkan Indonesia Poros Maritim : Perlu Pemikiran Akademisi*, diakses dalam [http://www.rri.co.id/post/editorial/806/editorial/mewujudkan\\_indonesia\\_poros\\_maritim\\_perlu\\_pe\\_mikiran\\_akademisi.html](http://www.rri.co.id/post/editorial/806/editorial/mewujudkan_indonesia_poros_maritim_perlu_pe_mikiran_akademisi.html) (29-04-2017, 13:22 WIB)

tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.<sup>8</sup>

Namun terlepas dari konsep yang dijelaskan oleh Jokowi selaku kepala negara tentunya ada pihak yang mempengaruhi setiap kebijakan yang dilakukan. Bagi Indonesia, pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, negara-negara Asia sedang bangkit sehingga Indonesia menjadikan momentum ini sebagai penunjang cita-cita Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia.<sup>9</sup> Melihat kondisi internasional seperti inilah yang membuat Jokowi bersemangat untuk menjalankan apa yang pernah dicitakan Soekarno di masa kepemimpinannya.

Selain dari itu hal ini juga menjadi bentuk komitmen dasar dari Jokowi guna untuk menjalankan anggaran dasar partai PDIP yang menjadi tempat tumbuh besarnya karir politik Jokowi selaku kader partai. Anggaran Dasar PDIP Dalam pasal 9 poin C dijelaskan fungsi partai sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan

---

<sup>8</sup> Damir Sagolj, *Pidato Lengkap Jokowi di KTT ASEAN Soal Poros Maritim*, Diakses dalam <https://www.viva.co.id/berita/dunia/558043-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-asean-soal-poros-maritim> (27-03-2018, 16:37 WIB)

<sup>9</sup> Presiden Ir.H.Joko Widodo, *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, diakses dalam <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> (29-04-2017, 12:43 WIB).

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup> Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi banyak berkaitan dengan PDIP atau Soekarno karena secara karir politik Jokowi tidak bisa lepas dari pengaruh Soekarno yang menjadi idolanya dan PDIP sebagai partai yang membesarkan nama dan karir politiknya. ...”*Bapak adalah idolaku selain Bung Karno, presiden pertama Indonesia. Menurutku, keduanya sama-sama memiliki sifat kemandirian yang kuat*”... <sup>11</sup> Kutipan inilah yang menjadi dasar kalau Jokowi merupakan pengagum berat dari bapak proklamator Indonesia tersebut.

Penulis melihat bahwa isu kembali ke laut atau maritim merupakan isu yang sangat menarik untuk dikaji dan penulis melihat bahwa kebijakan ini bukan karena pemikiran murni dari Jokowi. PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK dalam pemilihan presiden tahun 2014 merupakan hal yang perlu dikaji terutama dalam hal mempengaruhi Jokowi dalam membuat kebijakan. Penulis melihat bahwa Jokowi tumbuh bersama dengan pemikiran-pemikiran Soekarno dan pengaruh PDIP. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan peran Jokowi dalam pengambilan kebijakan dalam bidang kemaritiman.

---

<sup>10</sup> PDIP, *Visi dan Misi*, diakses dalam, diakses dalam <http://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/27/Partai/Visi-dan-Misi> (19-12-2016, 10:54 WIB)

<sup>11</sup> Gatotkoko Suroso, 2012, *Jokowi Si Tukang Kayu*, Jakarta Selatan: Ufuk Fiction, hal.20

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang dan arah penelitian maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran Joko Widodo dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemikiran maritim Soekarno melalui visi poros maritim dunia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui latar belakang dari poros maritim Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ideologi Joko Widodo dan PDIP dalam kebijakan poros maritim Indonesia.
- c. Untuk mengetahui peran Joko Widodo dalam implementasi pemikiran maritim Soekarno terhadap kebijakan poros maritim Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan tentang pengaruh Ideologi Jokowi dan PDIP terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dibidang kemaritiman.

### **a. Akademis:**

Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan dalam konteks hubungan internasional terutama tentang latar belakang kebijakan poros maritim Indonesia dan pengaruh ideologi Jokowi dan PDIP dalam kebijakan poros maritim Indonesia serta pengetahuan tentang bagaimana Jokowi menjalankan perannya sebagai presiden dan kader PDIP.

## **b. Praktis**

Hasil akhir dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi dalam mencari atau memecahkan masalah penelitian yang akan dilakukan penulis selanjutnya. Hasil ini akan menambah referensi penelitian selanjutnya terutama terkait dengan peran Jokowi terhadap implementasi nilai-nilai negara maritim Soekarno serta akan berguna untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan mengenai personal Jokowi dan platform partai.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

**Penelitian Pertama** berjudul *“Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia”*. Penelitian ini merupakan Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman yang merupakan Alumnus Diplomas Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia dan Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal ini membahas terkait dengan Diplomas maritim sebagai bentuk strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia. Jurnal ini membahas bagaimana suatu bentuk diplomasi yang bisa mempengaruhi kemaritiman Indonesia yaitu melalui diplomasi maritim.

Diplomasi maritim merupakan istilah yang berlaku untuk segala bentuk kegiatan di wilayah maritim atau perairan dalam hal ini tugas utamanya diberikan kepada Angkatan Laut suatu negara.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan keamanan

---

<sup>12</sup> Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 175 – 182, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Hal. 176



maritim menurut McNicholas adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian dan gangguan lainnya.<sup>13</sup> Keamanan maritim dan Diplomasi maritim merupakan dua konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan bagaimana diplomasi politik menjadi salah satu instrumen dalam pengembangan keamanan maritim Indonesia.

Dalam jurnal ini menyimpulkan tiga hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menggunakan diplomasi maritim sebagai alat untuk keamanan maritim. Adapaun tiga hal tersebut, pertama adalah pengembangan sumber daya kelautan yang komprehensif yang dipromosikan melalui kebijakan industri maritim secara terintegrasi. Kedua adalah kerja sama internasional melalui penggunaan diplomasi maritim mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa aktifasi badan dan lembaga kemaritiman seperti Bakamla, TNI AL, dan lembaga lainnya serta yang terakhir adalah kebijakan pengembangan diarahkan pada penelitian, pendidikan, pengelolaan industri kemaritiman yang mengedepankan teknologi dan pembangunannya yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

**Penelitian Kedua** dilakukan oleh Makmur Keliat melalui jurnal yang berjudul *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang implikasi kebijakan keamanan maritim bagi Indonesia. Penulis menjelaskan tiga pembahasan mendasar dari penelitian ini

---

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 178

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 181

yaitu yang pertama adalah konsep keamanan maritim bukanlah suatu konsep yang rinci namun keamanan ini merupakan suatu konsep yang lagi diperbincangkan ditataran dunia internasional. Pembahasan keduanya adalah karena ketidak jelasan dari konsep ini membuat negara-negara di Asia Tenggara untuk menyatukan pemikiran terkait dengan keamanan maritim. Pembahasan ketiga adalah identifikasi terkait dengan zona-zona yang sekiranya perlu untuk dilakukannya kerjasama keamanan maritim dengan pihak luar.

Penelitian ini membahas konsep keamanan maritim dari dua sisi. Sisi pertama adalah yang memandang dari kerangka tradisional (pembatasan konsep/de-securitization) dan kedua tentunya dari kerangka non tradisional (perluasan konsep/securitization).<sup>15</sup> Namun dalam kelanjutannya tidak ada kesepakatan bersama terkait dengan penjelasan tentang keamanan maritim. Hal ini tentunya membuat dampak tersendiri dari kebijakan negara-negara di Asia Tenggara terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan maritim.

Melihat konteks keamanan maritim yang belum jelas sampai dengan saat ini membuat Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan isu kemaritiman. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi dengan laut yang luas tentunya sangat penting untuk melakukan langkah-langkah untuk kedepan sehingga implikasi yang terjadi terhadap Indonesia tidak negatif atau merugikan negara terutama dalam sektor maritim. Hal ini membuat Indonesia harus banyak melakukan perubahan mendasar terkait dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang setidaknya

---

<sup>15</sup> Makmur Keliat, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakanannya Bagi Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129), Jakarta: Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Hal. 112

untuk memperjelas secara mendetail bagaimana status dan aturan yang berlaku di Indonesia ataupun aturan negara tetangga sehingga ketika pengambilan suatu kebijakan tidak keliru dan tidak merugikan satu sama lain terutama untuk Indonesia sendiri.

**Penelitian ketiga** berjudul “ *Pengaruh Daniel Ortega Dalam Melawan Dominasi Politik Amerika Serikat di Nikaragua*”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas kepribadian seorang presiden dengan melihat jejak kehidupan seorang Ortega yang sangat berani melawan dominasi AS di Nikaragua. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Ortega ini merupakan penganut faham garis kiri yang merupakan lawan ideologi dari AS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mikro dikarenakan pendekatan ini berasumsi bahwa pengetahuan tentang politik yaitu pengetahuan tentang manusia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana manusia berpikir tentang dirinya sendiri, cara memandang dan apa saja yang penting menurutnya dalam kehidupan. Teori yang digunakan adalah psikoanalisis dan teori peran dimana teori ini akan menjelaskan perilaku seorang individu dalam menjalankan peran tugasnya sebagai kepala negara. Penelitian ini sangat berfokus kepada perkembangan Ortega semata tanpa melihat sosok yang benar-benar mempengaruhi kehidupan dari Ortega tersebut.

---

<sup>16</sup> Ahmad Fakhri Amri, *Pengaruh Daniel Ortega Dalam Melawan Dominasi Politik Amerika Serikat di Nikaragua*, Skripsi, Malang, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

**Penelitian keempat** adalah penelitian yang berjudul “*Kebijakan PM Yingluck Shinawatra Terhadap Pembatalan Ekspor Beras ke Indonesia*”.<sup>17</sup>

Penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor keluarga dan pengalaman hidup Yingluck yang bisa membuat dia membatalkan kebijakan ekspor beras ke Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebelum menjadi PM, Yingluck merupakan keluarga miskin yang hidup dalam kesusahan sehingga baginya lebih penting memenuhi kebutuhan beras dalam negeri daripada mengimpor untuk negara lain.

Dalam penelitian ini bisa dilihat bagaimana proses tumbuhnya pemikiran Yingluck tentang *pro-poor* yang intinya sangat pro terhadap rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya terkhusus kaum petani. Penelitiannya ini menggunakan pendekatan *Idiosyncratic* dimana akan digunakan untuk melihat perilaku individu Yingluck serta menggunakan teori *rational choice* guna melihat strategi dan tujuan dalam pengambilan kebijakannya. Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh lingkungan dan kondisi keluarga di masa lalu yang mempengaruhi kebijakan Yingluck selama menjadi Presiden. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Yingluck melihat kondisi para petani dan kaum menengah kebawah.

---

<sup>17</sup> Enggar Swastika, Kebijakan PM Yingluck Sinawatra Terhadap Pembatalan Ekspor Beras ke Indonesia, Skripsi, Malang, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

**Penelitian Kelima** berjudul “*Pengaruh Ideologi dan Kharisma Hugo Chavez Terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kebijakannya di Venezuela*”.<sup>18</sup>

Penelitian ini membahas secara umum apa yang membentuk karakter dan kharisma dari Hugo Chavez. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh tokoh-tokoh Marxisme, Sosialis dan ideologi Bolivarian dalam membentuk karakter Hugo Chavez sehingga dalam pemerintahannya dia sangat anti terhadap barat dan ingin menjadikan negaranya sebagai negara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Penelitian ini menggunakan teori Leader Personality dan Foreign Policy, konsep Ideologi dan Kharisma . Teori dan konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian seorang pemimpin berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa serta menjelaskan pengaruh lingkungan dan interaksi kepribadian dengan budaya, ekonomi dan sosial politik yang secara otomatis membentuk ideologi dan kharisma dari Hugo Chavez.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas individu dan pengaruh ideologi seorang kepala negara. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah pada pembahasannya peneliti terdahulu lebih fokus kepada kepribadian Chavez dalam hal ini perkembangan ideologinya. Namun penelitian tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa yang mempengaruhi secara besar terhadap perkembangan ideologi Chavez. Qurrotu Aini sebagai penulis hanya menjelaskan secara penuh karir dan kondisi kehidupan Chavez ketika

---

<sup>18</sup> Qurrotul Aini, Pengaruh ideologi dan kharisma Hugo Chavez terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela, Skripsi, Malang, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

belum menjadi presiden sehingga hal itu mempengaruhi kehidupan dan kepribadiannya setelah menjadi presiden Venezuela.

Tabel Posisi Penelitian

NO	Penelitian Terdahulu	Analisa	Hasil
1	Jurnal, Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, "Maritime Sebagai Strategi Pembangunan".	-Konsep Diplomansi Maritim	Pengembangan sumber daya kelautan yang komprehensif yang dipromosikan melalui kebijakan industri maritim secara terintegrasi dan kerja sama internasional melalui penggunaan diplomasi maritim mendapatkan dukungan dari pemerintah serta yang terakhir adalah kebijakan pengembangan diarahkan pada penelitian, pendidikan, pengelolaan industri kemaritiman yang mengedepankan teknologi dan pembangunannya yang berkelanjutan. Ketiga hal ini menjadi hasil penelitian dari jurnal tersebut.
2	Jurnal, Makmur Keliat , Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia.	-Keamanan Maritim	Melihat ketidak jelasan terkait dengan pengertian keamanan maritim membuat Indonesia harus melakukan perubahan mendasar sehingga ketika pengambilan suatu kebijakan maritim tidak merugikan satu sama lain dengan negara tetangga terutama terkait tentang aturan yang membahas tentang keamanan maritim.
3	Skripsi, Ahmad Fakhrizal Amri, Pengaruh Daniel Ortega Dalam Melawan Dominasi Politik	-Eksplanatif -Psikoanalisi -Teori Peran	Menjalani masa kecil yang suram dengan dominasi AS di Nikaragua membuat Daniel Ortega tumbuh dengan perlawanan terhadap AS.

	Amerika Serikat di Nikaragua.		Sebagai anggota aliran kiri yang sosialis membuatnya sangat kontra dengan AS sehingga membuatnya melakukan perlawanan terhadap AS.
4	Enggar Swastika, Kebijakan PM Yingluck Sinawatra Terhadap Pembatalan Ekspor Beras ke Indonesia.	-Eksplanatif - Idiosyncratic -Rational Choice	Terlahir dari keluarga ekonomi menengah kebawah membuat PM Yingluck sangat memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dinilai bisa merugikan masyarakat kecil terutama kaum petani. Menurutnya memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah lebih penting daripada memenuhi kebutuhan warga negara lain terutama dalam hal kebutuhan makan.
5	Qurrotul Aini, Pengaruh ideologi dan kharisma Hugo Chavez terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela	-Eksplanatif -Psikoanalisis -Kharisma	Pengaruh pemikiran-pemikiran ideologi Marxis, Sosialis dan Nasionalis Bolivarian membentuk karakter kepemimpinan Hugo Chaves sehingga menyebabkan gaya kepemimpinannya yang sangat anti terhadap kapitalisme dan imperialisme.

## 1.6 Teori atau Konsep

### 1.6.1 Role Theory (Teori Peran)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran (*role theory*) milik B. J. Biddle. Teori peran merupakan teori yang berusaha untuk menganalisis suatu posisi yang dijalankan oleh seorang aktor politik. Peran merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dimana orang yang menduduki posisi tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat

posisi dimana dia berada dengan ketentuan-ketentuan harapan atau aturan yang sudah ditentukan.<sup>19</sup> Hal ini sebagai bentuk batasan-batasan aktor dalam menjalankan perannya di posisi tertentu sehingga peran yang dijalankan sesuai dengan ketentuan atau harapan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Biddle menggambarkan teori peran ini seperti pertunjukan teatrikal yang dijalankan oleh aktor-aktor dimana setiap aktor mempunyai batasan-batasan dalam berperan sesuai dengan naskah drama/scripts yang telah ditentukan dan dipahami sebelumnya.<sup>20</sup> Sehingga ketika seorang aktor menjalankan perannya dalam pertunjukan diharapkan tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan. Aturan yang sudah ditentukan atau biasa disebut dengan scripts ini digambarkan sebagai suatu harapan yang harus dipahami dan dipatuhi ketika menjalankan suatu peran. Posisi aktor ini kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam menjalankan perannya di kehidupan masyarakat.

Biddle menyebutkan ada 5 unsur untuk menjelaskan perilaku seseorang aktor dalam menjalankan peran di dalam kehidupan sosial ataupun politik.

1. *Pertama* adalah Harapan (*Expectation*)

Sebagian besar versi teori peran menganggap bahwa harapan adalah generator peran utama, harapan itu dipelajari melalui pengalaman, dan orang-orang atau aktor sadar akan harapan yang mereka pegang sesuai dengan posisinya di waktu itu.<sup>21</sup> Dalam buku Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, 1989, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Hal. 44

<sup>20</sup> B. J. Biddle, *RECENT DEVELOPMENTS IN ROLE THEORY*, *Center for Research in Social Behavior*, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri 65211, Hal. 68

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 69



Teorisasi) karya Mochtar Mas'ood dijelaskan bahwa harapan yang menjadi aktor utama dalam menjalankan suatu peran itu datang dari dua sisi yaitu harapan yang dipunyai orang oleh lain terhadapan pemegang peran dan bisa juga datang dari aktor itu sendiri dalam menafsirkan peranan yang dipegangnya melalui proses belajar atau *learning*.<sup>22</sup> Melalui proses learning atau pembelajaran itu maka akan muncul harapan-harapan yang kiranya bisa diinterpretasikan oleh pemegang peran sehingga aktor bisa mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak di boleh dilakukan oleh seorang aktor politik.

Dengan demikian, teori peran menjelaskan tiga harapan yang saling berkaitan yaitu terkait dengan harapan masyarakat, persepsi dari harapan orang lain dan interpretasi harapan dari pemegang peran itu sendiri.<sup>23</sup> Ketiga hal ini menjadi acuan dari seorang aktor politik dalam menjalankan perannya di kehidupan sosial sehingga apa yang menjadi tujuan seorang aktor politik bisa dijelaskan dan diramalkan sesuai dengan peran apa yang sedang dijalankannya. Oleh sebab itu aktor politik mempunyai batasan-batasan dalam sebuah pengambilan kebijakan baik skala nasional terlebih lagi dalam skala internasional.

## 2. Norma (*norm*)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan yang kembali di bagi ke dalam dua bentuk yaitu harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) dan harapan Normatif yang merupakan keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle membagi dua bagian untuk Harapan Normatif ini yaitu Harapan yang terselubung

---

<sup>22</sup> Mochtar Mas'ood, *Op, Cit*, Hal. 45-46

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal.48

(*covert*) yang merupakan harapan tanpa diucapkanpun akan selalu ada sedangkan yang kedua adalah harapan terbuka (*overt*) atau ucapan yang secara langsung diucapkan oleh pemegang peran itu sendiri atau disebut sebagai tuntutan peran (*role demand*).<sup>24</sup>

### 3. Paparan (*Description*)

Suatu perilaku dikatakan bersifat deskriptif dimana perilaku pemegang peran bisa menghadirkan kejadian baik yang berwujud proses atau fenomenanya serta paparan tidak kasat mata (*conception*) serta paparan kasat mata “pernyataan” (*statement*)<sup>25</sup>. Jadi bisa dibilang dalam menjalankan perannya seorang aktor tentunya akan menghasilkan sebuah paparan terutama ketika bicara dalam aktor politik dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Hal ini tentunya menjadi poin penting karena sebuah peran dilihat bentuk wujudnya dari tujuan dasar atau hasil terakhirnya. Tentunya *description* ini merupakan sebuah penjawantahan dari harapan-harapan yang sudah didapatkan melalui proses *learning* sebelumnya.

### 4. Penilaian (*evaluation*)

Dalam perilaku seorang aktor dalam menjalankan perannya akan menghasilkan sebuah evaluasi. Dalam mengukur *evaluation* ini maka yang menjadi patokan kita adalah *expectation* atau *norm* yang merupakan aturan atau *script* yang telah atau akan dijalankan oleh seorang pemegang peran. Dengan adanya unsur *evaluation* ini tentunya akan muncul hal positif dan negatif dari

---

<sup>24</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 2004, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Hal. 217-218

<sup>25</sup> Edy Suhardono, 1994, Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

orang yang menilai baik penilaian dari orang lain (eksternal) atau diri sendiri (internal).<sup>26</sup>

#### 5. Sanksi (*Sanction*)

Unsur kelima yang menjadi konsep dalam teori peran adalah *sanction* yang merupakan upaya orang lain untuk mempertahankan suatu nilai yang positif atau dalam hal yang lain adalah merubah nilai yang negatif menjadi sebuah hal yang positif.<sup>27</sup> Sama halnya dengan penilaian, sanksi juga bisa datang dari orang luar atau biasanya disebut sanksi eksternal dan dari diri sendiri sebagai sanksi internal. Tentunya sanksi ini juga berdasar dari *Expectation* dan *Norm* yang merupakan acuan orang lain ataupun diri sendiri dalam hal pemberian sanksi.

Dalam kehidupan sosial dan politik, tentunya kelima unsur diatas akan sangat saling berkaitan satu sama lain dalam operasional analisa peran yang dilakukan oleh seorang aktor terutama peran seorang aktor politik. Namun dari lima konsep tersebut penulis hanya akan menggunakan satu konsep yaitu *Expectation* atau harapan dalam menganalisa peran Jokowi. Adapun unsur lainnya tidak digunakan karena menurut penulis unsur *Description*, *Evaluation* dan *Sanction* lebih tepat untuk menganalisa dari hasil program kerja Jokowi yang terkait dengan kebijakan poros maritim Indonesia sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam pembahasan peran yang dilakukan oleh Jokowi melalui visi poros maritim guna mengimplementasikan nilai-nilai pemikiran maritim Soekarno.

---

<sup>26</sup> Sarlito, *Op., Cit*, Hal. 220

<sup>27</sup> *Ibid*,

Konsep yang terdapat dalam teori peran inilah yang akan digunakan dalam analisa di bab ketiga. Teori peran ini nantinya akan menjelaskan perilaku politik Jokowi dalam menjalankan peran politiknya sebagai seorang presiden. Namun sebelum menjadi presiden tentunya penulis akan menggambarkan pengalaman atau proses *learning* dari Jokowi baik selaku masyarakat biasa atau individu, kader PDIP, sebagai orang yang mengagumi Soekarno serta sebagai presiden Indonesia dalam melihat kondisi internasional. Teori ini akan menggambarkan bagaimana Jokowi menjalankan beberapa peran yang berbeda tetapi saling berkaitan erat satu sama lain. Tentunya multi peran yang dijalankannya tersebut sudah dibatasi dengan harapan-harapan yang ada atau disebut sebagai *Scripts* atau *Expectation*.

Dengan penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa proses penemuan peran seorang aktor politik bisa didapatkan dalam berbagai posisi seperti seorang presiden, menteri, anggota dewan, kader partai bahkan masyarakat biasa. Dalam posisi itu, teori peran berasumsi bahwa aktor politik akan berperilaku tertentu sesuai dengan peran yang dijalankannya. Peran ini muncul dari harapan atau dugaan yang dijalankan oleh seorang aktor guna untuk mencapai tujuan bersama. Penulis melihat Jokowi sebagai presiden dan kader PDIP menjalankan perannya yang tidak jauh dari harapan (*expectation*) atau *Scripts* yang sudah ditetapkan oleh PDIP sebagai kendaraan politik dan pengusungnya di pemilu 2014.

Penulis melihat bahwa teori peran ini tepat untuk menganalisa terkait dengan peran Jokowi dalam implementasi nilai-nilai pemikiran maritim Soekarno. Harapan atau dugaan (*expectation*) yang dimaksud disini adalah anggaran dasar

pasal 6 PDIP poin E dan pasal 9 poin C yang harus menjalankan pemikiran-pemikiran Soekarno sebagai *founding father* PDIP itu sendiri. Jokowi sebagai kader partai tentunya harus menjalankan perannya sebagai kader yang baik dalam posisinya sebagai aktor politik dalam hal ini sebagai presiden. Hal itu dilakukan dengan membuat sebuah kebijakan maritim yang dulunya pernah menjadi gagasan/harapan dan cita-cita seorang Soekarno. Jadi apa yang ada di anggaran dasar PDIP itu menjadi harapan dan batas seorang Jokowi dalam menjalankan perannya sebagai presiden Indonesia.

Jokowi sebagai presiden tentunya juga mempunyai peran yang lain selain dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Selain sebagai presiden tentunya Jokowi juga merupakan seorang politisi, warga negara dan yang paling penting adalah dia sebagai anggota partai atau kader PDIP. Sebagai kader partai tentunya peran yang dijalankan oleh seorang Jokowi selaku presiden tidak bisa jauh dari apa yang menjadi keinginan bersama atau cita-cita dari partai PDIP itu sendiri. Dengan demikian penulis menggunakan teori peranan ini guna menjelaskan bagaimana Jokowi dalam menemukan perannya melalui proses pengalaman dan *learning* sehingga kebijakan yang diambil selaku presiden tidak jauh dari apa yang menjadi harapan bersama masyarakat Indonesia dan harapan dari PDIP ataupun hasil interpretasi harapan dari peran Jokowi sebagai presiden.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tingkat Analisa**

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennnya atau unit analisisnya

adalah tentang peran Jokowi dalam implementasi nilai-nilai pemikiran Soekarno. Sedangkan unit explanasinya adalah visi politik luar negeri Indonesia di bidang kemaritiman. Oleh sebab itu unit analisa yang digunakan adalah bersifat induksionis dimana unit eksplanasinya berada lebih tinggi daripada unit analisisnya.

### **1.7.2 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.<sup>28</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara analisa non statistik. Data tabel dan grafik dijelaskan dalam uraian di kalimat atau pragraf. Teknik ini dilakukan dengan tahap klasifikasi data, mereduksi dan menginterpretasi data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan teori yang ada.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode pengumpulan data atau studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kasus atau topik pembahasan skripsi yang bersumber dari buku, tulisan, artikel, jurnal, dan website.

### **1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya penulis menentukan batasan tentang penelitian supaya apa yang menjadi pembahasan nantinya tidak melampaui batasan yang telah ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung : PT.Refika Aditama, hal.38-39

#### **a. Batasan Materi**

Batasan materi penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Jokowi menjalankan perannya sebagai presiden Indonesia sekaligus sebagai kader partai PDIP dan bagaimana PDIP dan Soekarno bisa mempengaruhi ideologi Jokowi dalam membuat sebuah kebijakan untuk Indonesia.

#### **b. Batasan Waktu**

Batasan waktu yang penulis gunakan adalah semenjak Jokowi menjadi anggota DPC PDIP kota Solo ditahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Batasan ini mengingat bahwa karir politik mulai muncul ketika bergabung dengan PDIP tahun 2004 dan sekarang masih menjabat sebagai presiden Indonesia yang ketujuh. Pada rentang waktu inilah karir politik Jokowi mulai menanjak naik. Pada proses inilah Jokowi sangat banyak mendapatkan masukan-masukan serta pengaruh-pengaruh dari partai, orang terdekat dan pemikiran-pemikiran Soekarno di PDIP.

### **1.8 Hipotesa**

Sebagai hipotesa dalam penelitian ini adalah penulis melihat bahwa pemikiran Jokowi tentang maritim muncul bukan karena pemikiran dari Jokowi sendiri tetapi ada unsur-unsur individu dan kelompok yang mempengaruhi Jokowi. Ketika dilihat dari karir politik ataupun masa lalunya tentu kita akan menemukan bagaimana dia mengidolakan Soekarno dalam kehidupannya sehingga Jokowi memutuskan untuk masuk PDIP di tahun 2004. Mulai dari situ karir politiknya mulai menanjak sampai Jokowi menjadi seorang presiden ketujuh Indonesia.

Kemaritiman merupakan salah satu harapan atau cita-cita yang menjadi prioritas utama dalam lima tahun kepemimpinannya kedepan. Penulis melihat bahwa Jokowi sebagai kader PDIP mengadopsi cita-cita pembesar partai PDIP yang terdahulu dalam hal ini Soekarno. Dimana pada saat pemerintahannya juga pernah menjadikan isu kemaritiman sebagai salah satu cita-cita dan harapan Soekarno. Isu ini menjadi hal yang menarik bagi penulis karena adanya kesamaan arah kebijakan walaupun beda masa pemerintahannya.

Sebagai kader partai PDIP tentunya Jokowi menjalankan amanat dan tugas partai yang salah satunya adalah pasal 6 poin E dan pasal 9 poin C di landasan dasar PDIP yang menjelaskan bahwa kader partai PDIP mempunyai tugas untuk mengajarkan atau menjalankan ajaran atau pemikiran dari pendiri PDIP yaitu Soekarno. Harapan ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai individu yang mengagumi Soekarno dan sebagai kader PDIP. Selain dari ada keharusan di UUD 1945 dalam pasal 25a dan 33 ayat 3 yang berkaitan dengan kemaritiman yang tentunya juga menjadi harapan atau patokan peran Jokowi dalam pengambilan sebuah kebijakan negara terutama dalam hal kemaritiman. Sebagai presiden juga tentunya Jokowi mempunyai cara sendiri dalam melihat situasi kelautan nasional dan internasional yang juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Oleh sebab itu, penulis melihat Jokowi sebagai kepala negara mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri terutama kebijakan maritim dengan tidak melepaskan perannya sebagai individu yang mengagumi Soekarno, sebagai kader PDIP dan presiden. Adanya multi peran ini membuat Jokowi menjadikan



isu maritim sebagai kelanjutan dari cita-cita Soekarno selaku pembesar partai PDIP yang juga merupakan sang idola presiden Jokowi. Multi peran inilah yang menghasilkan sebuah harapan yang bersifat meramalkan sebagai bentuk peran Jokowi sebagai presiden Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemikiran maritim Soekarno.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Pada BAB I akan dibahas tentang latar belakang Masalah yang mempengaruhi munculnya rumusan masalah, teori, hipotesa dan sistematika kepenulisan. Dalam BAB II penulis menggambarkan dinamika perkembangan isu kemaritiman di setiap era pemerintah mulai dari orde lama, orde baru dan sampai era reformasi. Sedangkan BAB III berisi analisa peran Jokowi dalam mengimplementasikan nilai-nilai pemikiran Soekarno melalui visi poros maritim duniadengan menggunakan teori peran (*role theory*). Adapun di BAB IV merupakan bab terakhir atau bab kesimpulan.